

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTEGRASI ILMU DAN MODERASI BERAGAMA DALAM TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI ERA SOCIETY 5.0 PADA UIN DATOKARAMA PALU

Dr. Sjakir Lobud, S.Ag.M.Pd^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama, Dr. Sjakir Lobud, S.Ag.M.Pd E-mail: Sjakir Lobud@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Integrasi ilmu, moderasi beragama, tata kelola, kebijakan publik, Society 5.0

ABSTRAK

Transformasi perguruan tinggi Islam di era Society 5.0 menuntut integrasi antara ilmu pengetahuan, nilai spiritualitas, dan moderasi beragama dalam sistem tata kelola kelembagaan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan integrasi ilmu dan moderasi beragama dalam tata kelola perguruan tinggi Islam, dengan studi pada UIN Datokarama Palu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis kebijakan dan perspektif administrasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan integrasi ilmu dan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kepemimpinan, budaya organisasi, serta mekanisme koordinasi lintas unit. Tantangan utama meliputi fragmentasi kebijakan, resistensi kultural, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola integratif berbasis nilai (*value-based governance*) yang mengintegrasikan aspek akademik, spiritual, dan sosial secara sistemik.

1. Pendahuluan

Era Society 5.0 ditandai dengan integrasi antara teknologi digital dan kehidupan manusia yang berorientasi pada kesejahteraan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi pembentukan nilai dan karakter. Perguruan tinggi Islam memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas.

Namun, realitas menunjukkan bahwa integrasi ilmu dan nilai keislaman seringkali masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam tata kelola kelembagaan. Demikian pula, moderasi beragama sebagai agenda strategis nasional seringkali belum terinternalisasi secara sistemik dalam kebijakan institusi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara visi normatif dan praktik implementatif.

Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia, UIN Datokarama Palu memiliki posisi strategis dalam mengembangkan model integrasi ilmu dan moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam tata kelola perguruan tinggi.

* Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

2. Tinjauan Pustaka

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Merilee S. Grindle menekankan pentingnya konteks implementasi, termasuk kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor.

Dalam konteks perguruan tinggi, implementasi kebijakan integrasi ilmu dan moderasi beragama memerlukan koordinasi lintas unit serta komitmen pimpinan dalam mengarahkan kebijakan menjadi praktik nyata.

2. Konsep Integrasi Ilmu

Integrasi ilmu dalam perguruan tinggi Islam mengacu pada upaya menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Konsep ini sejalan dengan paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi. Integrasi ilmu tidak hanya bersifat epistemologis, tetapi juga harus terwujud dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

3. Moderasi Beragama sebagai Kebijakan Publik

Moderasi beragama merupakan kebijakan strategis yang bertujuan menciptakan kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan damai. Dalam perspektif administrasi publik, moderasi beragama dapat dipahami sebagai nilai publik (*public value*) yang harus diinternalisasi dalam kebijakan dan layanan institusi.

4. Tata Kelola Perguruan Tinggi (University Governance)

Tata kelola perguruan tinggi mencakup sistem pengambilan keputusan, manajemen sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas. Konsep *good governance* menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam konteks ini, integrasi ilmu dan moderasi beragama harus menjadi bagian dari nilai inti (*core values*) dalam tata kelola institusi.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada UIN Datokarama Palu. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, observasi, dan kajian literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dan tata kelola publik.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Integrasi Ilmu dan Moderasi Beragama

Secara normatif, kebijakan integrasi ilmu dan moderasi beragama telah tertuang dalam visi, misi, dan dokumen strategis institusi. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal operasionalisasi kebijakan ke dalam program konkret.

Kebijakan seringkali berhenti pada level dokumen tanpa diikuti dengan indikator kinerja yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik implementatif.

2. Implementasi dalam Tata Kelola Kelembagaan

Implementasi kebijakan dalam tata kelola perguruan tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Kurikulum dan akademik: Integrasi ilmu masih terbatas pada penggabungan mata kuliah tanpa pendekatan interdisipliner yang mendalam.
- b. Budaya organisasi: Nilai moderasi beragama belum sepenuhnya menjadi budaya kerja
- c. Kepemimpinan: Peran pimpinan sangat menentukan dalam mendorong implementasi kebijakan. Kepemimpinan transformasional menjadi kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi:

- a. Komunikasi: Sosialisasi kebijakan belum merata di seluruh unit.
- b. Sumber daya: Keterbatasan SDM yang memahami integrasi ilmu menjadi kendala utama.

Disposisi: Komitmen individu masih bervariasi.

Struktur birokrasi: Fragmentasi antar unit menyebabkan koordinasi kurang optimal.

4. Model Tata Kelola Integratif

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan model tata kelola integratif berbasis nilai yang mencakup:

1. Integrasi kebijakan: Sinkronisasi antara visi, misi, dan program kerja
2. Penguatan kepemimpinan: Pimpinan sebagai role model moderasi dan integrasi
3. Pengembangan SDM: Pelatihan dan peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan
4. Kolaborasi lintas sektor: Kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah

Model ini menempatkan integrasi ilmu dan moderasi beragama sebagai inti dari tata kelola perguruan tinggi.

Diskusi Kritis

Jika ditarik lebih tajam, problem utama bukan pada ketiadaan kebijakan, tetapi pada defisit implementasi. Banyak perguruan tinggi memiliki dokumen strategis yang ideal, namun lemah dalam eksekusi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif harus bergeser dari sekadar compliance menuju performance-based governance.

Selain itu, integrasi ilmu seringkali dipahami secara simbolik, bukan substantif. Padahal, dalam era Society 5.0, integrasi ilmu justru menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab kompleksitas masalah sosial.

Moderasi beragama juga tidak cukup dijadikan slogan, tetapi harus diinternalisasi dalam sistem tata kelola, termasuk dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial di kampus.

5. Kesimpulan

Implementasi kebijakan integrasi ilmu dan moderasi beragama dalam tata kelola perguruan tinggi Islam merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Studi pada UIN Datokarama Palu menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Diperlukan pendekatan tata kelola integratif berbasis nilai yang mampu menghubungkan antara kebijakan, praktik, dan budaya organisasi. Kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi kelembagaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi.

Dengan demikian, perguruan tinggi Islam di era Society 5.0 harus mampu menjadi model integrasi antara ilmu, spiritualitas, dan nilai moderasi dalam tata kelola kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azra, Azyumardi. (2019). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran ke Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, Stephen P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Riyanto, Agus. (2020). *Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zuhdi, Muhammad. (2018). *Islam Moderat: Konsep dan Implementasinya dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.